

# DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PANEL DATA

Nur Widiastuti<sup>1</sup>

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Samsubar Saleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT

*The relationship between government expenditures and economic growth is an ambiguous relationship. The results of previous empirical studies indicate that the relationship between the two variables can be a positive or negative relationship. The purpose of this study is to investigate a more detailed relationship between economic growth and government expenditures. The detailed information between these two variables is obtained by investigating the direction of the relations in three levels, i.e. in various countries, in Indonesia, and in provinces in Indonesia. Furthermore, this research also investigates the variables which can drive the economic growth in those three groups of estimations. This research is conducted by using fixed effects panel data method for 96 countries and 33 provinces in Indonesia. The countries' data are estimated for the period of 1991–2014, while the provinces in Indonesia data are estimated for the period 2011–2013. Based on the results, it can be concluded that the relationship between government expenditures and economic growth depends on many factors. Moreover, the results also show variations in the relations between the two observed variables in the three groups of estimations.*

**Keywords:** *economic growth; government expenditures; panel data; fixed effects model*

## ABSTRAK

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan yang ambigu. Hasil studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut dapat merupakan hubungan positif ataupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi dengan lebih detail arah hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai arah hubungan ini, maka dilakukan investigasi dalam tiga tingkatan, yaitu: pertama di tingkat antarnegara, kedua di Indonesia, dan ketiga antarprovinsi di Indonesia. Selain itu, secara lebih jauh penelitian ini juga melakukan investigasi variabel apakah yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di ketiga kelompok objek penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode data panel berupa *fixed effects model* yang terdiri dari 96 negara dan 33 provinsi di Indonesia. Data negara diestimasi untuk periode 1991–2014, sedangkan data provinsi di Indonesia diestimasi untuk periode 2011–2013. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada banyak hal. Dengan melakukan observasi antarkelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan dan antarunit observasi (keseluruhan Indonesia dan provinsi di Indonesia) maka arah hubungan yang ditunjukkan pun bervariasi.

**Kata kunci:** *pertumbuhan ekonomi; pengeluaran pemerintah; data panel; fixed effects model*

**Klasifikasi JEL:** H0; H5

## 1. PENDAHULUAN

Terdapat setidaknya dua alasan yang menyebabkan suatu negara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yaitu dalam rangka menyediakan lapangan

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi: STIE Widya Wiwaha, Jalan Lowanu Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta.  
Email: widiastutisoepardjo@gmail.com

kerja/kesempatan kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, penguasaan teknologi, ketersediaan modal, dan keberadaan usahawan dalam suatu negara. Salah satu wujud kebijakan ekonomi pemerintah adalah kebijakan fiskal, berupa langkah-langkah perubahan dalam bidang perpajakan dan belanja pemerintah yang dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi belanja agregat dalam perekonomian.

Di dalam sistem perekonomian kapitalis maupun sistem perekonomian sosialis, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam memengaruhi pergerakan perekonomian suatu negara. Peran pemerintah dalam sistem kapitalis murni terdiri dari tiga fungsi, yaitu: fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Pada perekonomian modern, terdapat tiga fungsi utama pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1999). Pemerintah menjabarkan ketiga fungsi tersebut kedalam kebijakan ekonomi makro yang tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan menghindari/mengatasi terjadinya inflasi.

Di dalam rangka mengukur kinerja suatu perekonomian, para peneliti sering menggunakan tiga variabel ekonomi yaitu produk domestik bruto riil (*real gross domestic product*), tingkat inflasi (*inflation rate*) dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*). Pengaruh belanja pemerintah (*government expenditure*) terhadap suatu perekonomian telah dibuktikan oleh banyak peneliti, antara lain dengan mengamati hubungan antara variabel belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.

Saat ini, sebagian besar negara di dunia, baik yang sistem perekonomiannya lebih condong ke kapitalis maupun sosialis, melaksanakan kebijakan anggaran pemerintah defisit, yaitu jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan; dari 140 negara, 108 di antaranya melaksanakan defisit anggaran (Worldbank, 2017). Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya kebijakan defisit anggaran, terdapat tiga teori/pandangan, yaitu *Richardian Equivalence*, Neo-Klasik dan Keynesian. Menurut *Richardian Equivalence*, kebijakan defisit anggaran tidak berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Menurut Neo-Klasik, kebijakan defisit anggaran berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara. Menurut Keynesian, kebijakan defisit anggaran berpengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara.

Penelitian terkait dengan pengaruh kebijakan belanja/pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara, dengan kesimpulan yang tidak konsisten/ambigu. Kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, bahwa pengeluaran pemerintah (kebijakan defisit anggaran), tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada level dunia (pada beberapa negara), level negara Indonesia dan level provinsi. Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya berguna dalam pengembangan ilmu ekonomi, tapi juga bermanfaat dalam penyusunan kebijakan

anggaran belanja pemerintah dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan.

Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian yaitu: (1) Apakah terdapat pengaruh antara variabel rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan variabel fiskal lainnya yaitu penerimaan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi untuk semua negara?; (2) Apakah hal tersebut juga berlaku apabila negara-negara yang menjadi objek penelitian dikelompokkan menjadi negara berpendapatan tinggi, berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah?; (3) Apakah terdapat pengaruh antara variabel pengeluaran pemerintah daerah dan variabel fiskal lainnya yaitu penerimaan pemerintah daerah, belanja pegawai daerah, belanja barang dan jasa daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik menjadi perdebatan di antara para ahli ekonomi publik. Kontroversi utama adalah dapatkah sektor publik menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (*long run steady state growth economy*). Secara umum, gambaran pengeluaran publik yaitu infrastruktur fisik atau *human capital* dapat mempertinggi pertumbuhan, tetapi pengeluaran dapat juga memperlambat pertumbuhan ekonomi karena adanya efek dis-insentif (*disincentive effect*). Secara umum, dampaknya tergantung dari *trade-off* antara pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak yang bersifat distorsi.

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan di antaranya oleh Arpaia dan Turrini (2008) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dengan *output* potensial di negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan nilai rata-rata hasil estimasi *group* dengan data panel. Dengan menggunakan sampel 15 negara UE pada periode tahun 1970-2003. Arpaia dan Turrini (2008) melakukan investigasi hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dengan *output* potensial negara-negara anggota Uni Eropa. Uji kointegrasi panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan *output* potensial memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Estimasi dilakukan dengan menggunakan *Pooled Mean Group* (PMG) yang memungkinkan dilakukannya penggabungan ketepatan estimasi dengan menggunakan dimensi silang data panel antarnegara. Pada keadaan keterbatasan dan konsistensi data dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya heterogenitas koefisien regresi antarnegara. PMG menentukan elastisitas jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dengan *output* potensial untuk semua negara.

Estimasi yang dilakukan oleh Arpaia dan Turrini (2008) menunjukkan bahwa asumsi umum mengenai elastisitas jangka panjang dapat diterima bahkan beberapa di antaranya mendekati satu. Elastisitas jangka panjang yang tidak stabil kemungkinan terjadi penurunan untuk beberapa dekade. Besarnya elastisitas jangka panjang berbeda-beda, elastisitas jangka panjang lebih besar dari satu terjadi pada negara-negara yang cepat tumbuh, utang yang rendah dan di negara-negara yang memiliki kontrol hukum mengenai pengeluaran pemerintah yang lemah. Beberapa negara memiliki elastisitas jangka pendek menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan penyesuaian pengeluaran pemerintah terhadap *output* potensial adalah tiga tahun, meskipun koefisiennya sangat bervariasi. Negara Anglo-Saxon dan Nordik secara umum memperlihatkan kecepatan penyesuaian yang lebih tinggi dibanding negara-negara Eropa

Selatan. Hal ini memiliki implikasi kebijakan pengawasan anggaran bagi negara-negara Uni Eropa. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial model estimasi penting untuk mengukur hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan *output* potensial.

Barro (1989) menemukan adanya hubungan negatif antara persentase pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Barro (1990) selanjutnya meneliti tentang hubungan antara *share* pengeluaran pemerintah dalam PDB dan tingkat pertumbuhan riil PDB per kapita dengan menggunakan model pertumbuhan endogen. Keistimewaan model Barro adalah adanya *constant returns to capital* yang luas yang termasuk *private capital* dan *publik service*, dan mempertimbangkan hubungan antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, Barro (1991) melakukan penelitian serupa untuk 98 negara yang hasilnya menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat pertumbuhan *output* dengan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sedangkan investasi publik memiliki hubungan yang positif, namun tidak signifikan dengan tingkat pertumbuhan *output*

Landau (1983) melakukan studi dengan menggunakan data lebih dari 100 negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan persentase pengeluaran pemerintah pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menurunkan pertumbuhan PDB per kapita, pengeluaran pemerintah untuk konsumsi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah yang lain berdampak kecil pada pertumbuhan ekonomi. Kweka dan Morrissey (2000) meneliti dampak pengeluaran pemerintah pada perekonomian Tanzania, menggunakan data 1965-1996 dan menemukan bahwa kenaikan investasi pemerintah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan konsumsi mendorong pertumbuhan.

Ram (1986) dan Grossman (1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tanpa membedakan pengeluaran per sektor. Diamond (1989) mengamati tentang pengaruh pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi, hasilnya penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Diamond (1989) juga menemukan bahwa pengeluaran modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif dalam hal ini berlangsung dalam jangka panjang dan menimbulkan inefisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bose, Haque, dan Osborn (2007) menguji efek pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara sedang berkembang dengan periode waktu 1970-1980. Hasil penelitian ini menunjukkan pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran konsumsi tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Romer (1990), Alexander (1990), dan Folster dan Henrekso (1999) menyimpulkan bahwa total pengeluaran pemerintah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Lin (1994) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pertahanan dan pendidikan berdampak positif, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan berdampak negatif. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif berdampak negatif dan tidak signifikan di negara industri dan berdampak positif dan signifikan di negara sedang berkembang.

Devarajan dan Vinaya (1993) melakukan penelitian terhadap 14 negara OECD, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, transportasi dan komunikasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pemerintah untuk

pendidikan dan pertahanan tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan. Joharji dan Starr (2011) menggunakan data runtun waktu dengan periode waktu 1969-2005 bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan pendapatan sektor migas dan non-migas. Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non-migas.

Studi empiris mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah juga dilakukan oleh Ghali (1997) dengan melakukan studi di Saudi Arabia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti yang konsisten bahwa perubahan pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini digambarkan sebagai *output* riil per kapita. Bagian terpenting dalam penelitian ini adalah implikasi dari perilaku kebijakan publik di Saudi Arabia yaitu pemerintah melakukan kebijakan defisit anggaran yang menunjukkan ukuran dan batasan peran pemerintah dalam perekonomian. Penelitian serupa untuk Saudi Arabia juga dilakukan oleh Alshahrani dan Alsadiq (2014). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB per kapita non-migas. Pengeluaran pemerintah yang diobservasi dibedakan menjadi tujuh katagori, yaitu perumahan, pendidikan, pertahanan, kesehatan, *current* dan *capital government expenditure*, dan investasi pemerintah. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *cointegration*, VAR, dan VECM. Data yang digunakan adalah data tahunan dengan periode 1969-2000. Hasil studi menunjukkan bahwa pada jangka pendek penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi domestik, tingkat keterbukaan, investasi pemerintah, dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan. Dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa pada jangka panjang faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi swasta, pengeluaran modal, dan kesehatan didalamnya termasuk *human capital*.

Studi empiris yang sedikit berbeda dilakukan oleh Loizides dan Vamvoukas (2005) yang mencoba mengidentifikasi hubungan ukuran pemerintah, yang diukur sebagai *share* total pembelanjaan dalam *Gross National Product* (GNP) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan *Granger Causality* dengan menggunakan *bivariate error correction model*. Selain itu, dalam estimasi ditambahkan pula variabel tingkat pengangguran dan inflasi sebagai variabel eksplanatori yang selanjutnya dianalisis secara *trivariate* untuk setiap variabel. Kombinasi analisis *bivariate* dan *trivariate* ini menunjukkan pola hubungan kausal. Estimasi dilakukan untuk Yunani, Inggris dan Irlandia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua negara sampel di jangka pendek. Untuk Irlandia dan Inggris, hubungan ini juga terjadi dalam jangka panjang.

Beberapa studi empiris untuk menginvestigasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah telah dilakukan untuk kasus Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Kompas (2000) mengindikasikan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah khususnya bagian dari sektor jasa publik tidak secara jelas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang lain dilakukan oleh Ramayadi (2003) menemukan bahwa ukuran pemerintah cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penemuan ini mengungkapkan adanya ketidakjelasan yang disertakan dalam program pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefisienan dalam manajemen dari anggaran pemerintah di Indonesia selama periode tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) bertujuan untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional dilakukan dengan

menggunakan data panel Indonesia dengan menggunakan data 26 provinsi selama periode tahun 1993-2003. Metode estimasi yang digunakan adalah metode panel data dengan *General Least Square* (GLS). Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode 1993-2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja dan derajat keterbukaan, sedangkan investasi swasta tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya telah menjadi isu yang menarik pada beberapa dekade terakhir. Hasil studi empiris dan literatur tentang hal tersebut dikelompokkan menjadi dua: (1) kelompok studi pertama mengkaji tentang penyebab pertumbuhan sektor publik; dan (2) kelompok studi yang lain mengestimasi dampak aliran pengeluaran pemerintah pada keputusan individu dan secara khusus mengestimasi dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Para ahli ekonomi makro khususnya mazhab Keynesian percaya bahwa pengeluaran pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga pengeluaran pemerintah dianggap sebagai kekuatan eksogen yang mampu mengubah *output* agregat. Estimasi hal tersebut dilakukan dengan menggunakan model regresi standar (Landau, 1983) atau dengan model *Error Correction Model* (Ghali, 1997) dan hasil estimasi menunjukkan kesimpulan yang ambigu.

Peran pengeluaran pemerintah di negara maju berbeda dengan di negara terbelakang. peran pengeluaran pemerintah (sektor publik) di negara maju terutama ditujukan untuk stabilisasi perekonomian, stimulasi aktivitas investasi privat dan sebagainya. Sedangkan di negara terbelakang pengeluaran pemerintah memainkan peran aktif berupa: pengurangan disparitas regional, pengembangan *social overheads*, penciptaan infrastruktur pertumbuhan ekonomi dalam bentuk fasilitas transportasi dan komunikasi, pendidikan dan latihan, pertumbuhan industri barang-barang modal, pertumbuhan industri dasar dan utama, *research and development*, stimulasi tabungan nasional, pembentukan modal dan sebagainya.

### 3. METODE PENELITIAN

Berbagai studi tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun suatu daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak variabel di antaranya variabel fiskal dan variabel makroekonomi. Variabel fiskal di antaranya rasio antara pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB; sedangkan untuk variabel makro lainnya dalam penelitian ini adalah variabel rasio antara *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan *Foreign Direct Investment* (dalam bentuk Ln).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dijelaskan sebelumnya, dampak variabel fiskal yaitu rasio pengeluaran pemerintah dan variabel penerimaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif, negatif, maupun tidak berdampak. Sedangkan dampak variabel makroekonomi lainnya yaitu variabel rasio *Gross Fixed Capital Formation* atas PDB dan *Foreign Direct Investment* (dalam bentuk Ln) terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam sebagian besar hasil penelitian menunjukkan dampak positif.

Pada cakupan wilayah yang lebih sempit yaitu pemerintah provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah daerah sedangkan untuk variabel fiskal lainnya yang dipilih adalah: total penerimaan pemerintah daerah, total belanja pegawai, total belanja barang dan jasa dan total belanja modal.

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah bahwa hubungan antara tingkat pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi bergantung dari tingkatan pembangunan di sebuah negara dan dari tingkat pemerintahan yang diinvestigasi. Aspek tingkat pembangunan negara diuji dengan melakukan estimasi negara yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan. Sedangkan aspek tingkat pemerintahan diinvestigasi dengan membandingkan antara model estimasi Indonesia dengan model estimasi tingkat provinsi.

Model estimasi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Secara umum model estimasi untuk panel negara dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it}(Gov\ Expenditure/PDB)_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it}(Gov\ Expenditure/PDB)_{it} + \sum_{j=1}^n \delta_{j\ it} X_{j\ it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it}(Gov\ Expenditure/PDB)_{it} + \sum_{j=1}^n \delta_{j\ it} X_{j\ it} + \sum_{j=1}^n \theta_{j\ it} Z_{j\ it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$Y_{it}$  adalah pertumbuhan ekonomi,  $Gov\ Expenditure_{it}$  adalah pengeluaran pemerintah, PDB adalah *Gross Domestic Product*,  $X_{j\ it}$  adalah variabel fiskal lainnya, dan  $Z_{j\ it}$  adalah variabel makroekonomi lainnya. Variabel fiskal sebagai variabel independen yang diestimasi adalah rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB. Sedangkan variabel makro lainnya adalah rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan Ln(FDI).

Model estimasi untuk Indonesia dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_{1t}(Gov\ Expenditure/PDB)_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_{1t}(Gov\ Expenditure/PDB)_t + \beta_{2t}X_t + \varepsilon_t \quad (5)$$

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_{1t}(Gov\ Expenditure/PDB)_t + \beta_{2t}X_t + \beta_{3t}Z_{1t} + \beta_{4t}Z_{2t} + \varepsilon_t \quad (6)$$

$Y_t$  adalah pertumbuhan ekonomi,  $Gov\ Expenditure_t$  adalah total pengeluaran pemerintah, PDB adalah *Gross Domestic Product*,  $X_t$  adalah variabel fiskal lainnya, dan  $Z_t$  adalah variabel makroekonomi lainnya. Variabel fiskal yang diestimasi sebagai variabel independen adalah rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB. Sedangkan variabel makro lainnya adalah rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan Ln(FDI).

Sedangkan model estimasi untuk tingkat provinsi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it}(Gov\ Expenditure/PDRB)_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it}(Gov\ Expenditure/PDRB)_{it} + \sum_{j=1}^n \delta_{j\ it} \ln X_{j\ it} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

$Y_{it}$  adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau pendapatan per kapita,  $Gov\ Expenditure_{it}$  adalah total pengeluaran pemerintah daerah, PDRB adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan  $\ln X_{j\ it}$  adalah variabel fiskal lainnya. Dalam model provinsi ini, variabel fiskal lainnya yang diestimasi adalah total penerimaan pemerintah daerah, total belanja pegawai daerah, total belanja barang dan jasa daerah dan total belanja modal daerah.

#### 4. DATA

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu data yang memiliki dimensi waktu dan ruang. Dalam panel data, data *cross section* yang sama diobservasi menurut waktu. Jika setiap *cross-section unit* memiliki jumlah observasi *time-series* yang sama maka disebut dengan *balanced panel*; sedangkan jika jumlah observasi berbeda untuk setiap *cross-section unit*, maka disebut *unbalanced panel* (Gujarati, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan negara-negara dan provinsi di Indonesia.

Untuk negara, data yang dikumpulkan adalah data panel untuk 96 negara dari periode 1991 sampai dengan 2014. Sumber data untuk level negara diperoleh dari Bank Dunia. Untuk estimasi Indonesia menggunakan data *time-series*, observasi dilakukan untuk periode 1991 sampai dengan 2014. Sumber data diperoleh dari Bank Dunia. Sedangkan untuk estimasi provinsi menggunakan data panel, observasi dilakukan untuk periode 2011 sampai dengan 2013 untuk 33 provinsi. Data tingkat provinsi diperoleh dari rangkuman APBD yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Gujarati (2003) menyebutkan beberapa keuntungan menggunakan data panel, antara lain: terpenuhinya syarat *heterogeneity*; lebih informatif, bervariasi, *degree of freedom* lebih besar, dan lebih efisien; dapat menghindari masalah multikolinearitas; lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis; lebih dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data *cross-section* murni atau *time-series* murni; dapat digunakan untuk mempelajari *behavioral models*; serta meminimalkan bias. Nerlove (2000) juga mencatat beberapa keunggulan data panel dibandingkan dengan kumpulan data yang hanya terdiri dari data dimensi temporal. Pertama, data panel memiliki ketersediaan data yang lebih banyak dibandingkan dengan data *time-series*. Kedua, karena data panel tidak memiliki agregasi yang tinggi seperti dalam *time-series* dan observasi dilakukan pada unit-unit individual yang sama selama waktu tertentu. Sehingga hipotesis yang lebih kompleks dapat diujikan dan dibandingkan dengan menggunakan data berdimensi tunggal. Ketiga, penggunaan data panel bermanfaat dalam menganalisis sifat alamiah variabel gangguan atau variabel laten dalam hubungan ekonometri. Dalam konteks penelitian-penelitian di negara berkembang, penggunaan data panel sangat penting karena pada umumnya negara berkembang tidak memiliki koleksi data statistik dengan rentang waktu yang panjang.

Dalam estimasi dengan data panel, terdapat dua tipe pemodelan, yaitu *fixed effects model* dan *random effects model*. Pembagian tipe model ini didasarkan pada asumsi faktor yang tidak dapat diamati (*unobserved variables*). Estimasi data panel dalam penelitian ini menggunakan *fixed effects model*, karena mengasumsikan bahwa *unobserved variables* dalam estimasi ini bersifat konstan, baik antarobservasi *cross section* maupun antarobservasi runtun waktu. Untuk estimasi model negara, model data panel diestimasi sebagai *unbalanced panel*, sedangkan model provinsi, model data panel diestimasi sebagai *balanced panel*.

#### 5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 5.1. Hasil Estimasi Level Negara

Estimasi pada level negara dilakukan untuk empat kelompok panel, yaitu: panel seluruh negara dalam observasi (*All*) yang terdiri dari 96 negara; panel negara berpendapatan tinggi (*high*



*income countries*) yang terdiri dari 49 negara; panel negara berpendapatan menengah (*middle income countries*) yang terdiri dari 41 negara; serta, panel negara berpendapatan rendah (*low income countries*) yang terdiri dari 8 negara.

Hasil estimasi untuk panel negara dapat dilihat pada Tabel 1. Dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, hasil estimasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruh yang diberikan merupakan pengaruh yang relatif kecil dan negatif (lihat hasil model 1).

Ketika estimasi dibagi menjadi panel negara berdasarkan tingkat pendapatan negara, maka rasio total pengeluaran pemerintah terhadap PDB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Arah pengaruh variabel ini berbeda antarkelompok negara. Kelompok negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan menengah hasilnya menunjukkan rasio total pengeluaran pemerintah terhadap PDB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Namun untuk negara berpendapatan rendah, rasio total pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi model 2 menunjukkan variabel rasio pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan untuk semua negara, negara maju dan negara sedang berkembang sedangkan untuk negara berpendapatan rendah pengaruh rasio pengeluaran terhadap PDB terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Variabel rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Model 3 selanjutnya memberikan gambaran lebih jauh mengenai variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi panel semua negara menunjukkan semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah variabel rasio total penerimaan pemerintah terhadap PDB, rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan LN *Foreign Direct Investment*. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Hasil estimasi kelompok negara berpendapatan tinggi menunjukkan bahwa hampir semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali variabel LN *Foreign Direct Investment*. Faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah variabel rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB dan rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB, sedangkan rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil estimasi kelompok negara berpendapatan menengah menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah variabel rasio total penerimaan pemerintah terhadap PDB, rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan LN *Foreign Direct Investment*. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Hasil temuan untuk negara berpendapatan menengah tersebut konsisten dengan hasil penelitiannya Barro (1991), Landau (1983), Bose *et al.* (2007) dan Devarajan dan Vinaya (1993). Sedangkan untuk negara berpendapatan rendah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah variabel rasio total penerimaan pemerintah terhadap PDB.

**Tabel 1. Hasil Estimasi Panel Negara – Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi				
Model 1	All	High-income countries	Middle-income countries	Low-income countries
Konstanta	7,7747***	7,1023***	10,7639***	3,4133***
Govt Expenditure/PDB	-0,1474***	-0,1182***	-0,2990***	0,1515***
<i>R-squared</i>	0,1951	0,1793	0,1862	0,1657
<i>Adjusted R-squared</i>	0,1403	0,1259	0,1313	0,0872
<i>Akaike info criterion</i>	5,6668	5,6329	5,6694	5,8390
<i>Schwarz criterion</i>	6,0091	5,9248	5,9587	6,0825
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	5,7943	5,7450	5,7816	5,9373
Model 2	All	High-income countries	Middle-income countries	Low-income countries
Konstanta	5,2783***	5,4606***	5,4420***	-4,9697
Govt Expenditure/PDB	-0,3247***	-0,2537***	-0,6655***	-0,0542
Govt Revenue/PDB	0,2716***	0,1843***	0,6144***	0,9354***
<i>R-squared</i>	0,2410	0,2158	0,2703	0,2296
<i>Adjusted R-squared</i>	0,1879	0,1625	0,2191	0,1461
<i>Akaike info criterion</i>	5,6221	5,6045	5,5703	5,7895
<i>Schwarz criterion</i>	5,9719	5,9074	5,8694	6,0618
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	5,7525	5,7210	5,6864	5,8995
Model 3	All	High-income countries	Middle-income countries	Low-income countries
Konstanta	-2,4629	1,9582	-5,1187***	0,2736
Govt Expenditure/PDB	-0,2302***	-0,1774***	-0,6019***	-0,0238
Govt Revenue/PDB	0,1528***	0,1159***	0,4385***	0,8628*
Gross Fixed Capital Formation/PDB	0,1914***	0,2276***	0,1216***	0,1446
ln(FDI)	0,1825**	-0,0997	0,4989***	-0,3991
<i>R-squared</i>	0,2891	0,2781	0,3344	0,2292
<i>Adjusted R-squared</i>	0,2356	0,2239	0,2832	0,1176
<i>Akaike info criterion</i>	5,5214	5,4942	5,4459	5,8340
<i>Schwarz criterion</i>	5,8927	5,8224	5,7686	6,1718
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	5,6601	5,6207	5,5714	5,9701

Keterangan: \*\*\* signifikan untuk  $\alpha=1\%$ ; \*\* signifikan untuk  $\alpha=5\%$ ; \* signifikan untuk  $\alpha=10\%$

## 5.2. Hasil Estimasi Indonesia

Hasil analisis untuk Indonesia menggunakan data *time-series* dapat dilihat pada Tabel 2. Estimasi untuk Indonesia dilakukan dengan memvariasikan variabel dependen yang digunakan, yaitu dengan menggunakan pendapatan per kapita (PDB per Kapita) dan pertumbuhan ekonomi (g). Estimasi dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa variabel fiskal yang diestimasi dalam persamaan ini tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kecuali pada model 3, variabel rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada model 3 dengan variabel dependen pendapatan per kapita menunjukkan bahwa variabel rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita sedangkan variabel rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Sedangkan variabel rasio *Gross Fixed Capital Formation* terhadap PDB dan variabel LN *foreign direct investment* (FDI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Indonesia (Data Time-series)**

Model 1	Variabel Dependen	
	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	6,0521***	9,1200
<i>Govt Expenditure/PDB</i>	0,0629**	-0,3099
<i>R-squared</i>	0,2125	0,0401
<i>Adjusted R-squared</i>	0,1662	-0,0164
<i>Akaike info criterion</i>	1,0034	6,0584
<i>Schwarz criterion</i>	1,1028	6,1578
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	1,0203	6,0752
Model 2	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	5,5502***	-13,3414
<i>Govt Expenditure/PDB</i>	0,0548	-0,6722
<i>Govt Revenue/PDB</i>	0,0363	1,6264
<i>R-squared</i>	0,2181	0,1268
<i>Adjusted R-squared</i>	0,1203	0,0177
<i>Akaike info criterion</i>	1,1016	6,0689
<i>Schwarz criterion</i>	1,2507	6,2180
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	1,1268	6,0942
Model 3	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	3,3830***	0,9322
<i>Govt Expenditure/PDB</i>	0,1377***	-0,5100***
<i>Govt Revenue/PDB</i>	-0,1116**	0,3070
<i>Gross Fixed Capital Formation/PDB</i>	0,0444	-0,1232
<i>ln(FDI)</i>	0,1120	0,4890
<i>R-squared</i>	0,8902	0,6500
<i>Adjusted R-squared</i>	0,8414	0,4945
<i>Akaike info criterion</i>	-0,6594	3,1808
<i>Schwarz criterion</i>	-0,4311	3,4090
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-0,6805	3,1597

Keterangan: \*\*\* signifikan untuk  $\alpha=1\%$ ; \*\* signifikan untuk  $\alpha=5\%$ ; \* signifikan untuk  $\alpha=10\%$

Rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dalam hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Sedangkan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita. Hal ini dimungkinkan karena penerimaan pemerintah yang utama di Indonesia adalah berasal dari pajak, kenaikan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB yang dimotori dengan penerimaan pajak akan menurunkan pendapatan per kapita.

### 5.3. Hasil Estimasi Provinsi

Estimasi juga dilakukan untuk tingkat provinsi. Estimasi untuk tingkat provinsi dilakukan untuk 33 provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Hasil estimasi tingkat provinsi untuk tiga model dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Estimasi Panel Provinsi di Indonesia**

Variabel Dependen		
Model 1	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	15,8954***	6,4418***
<i>Govt Expenditure/PDRB</i>	0,0002	0,0016
<i>R-squared</i>	0,9958	0,5945
<i>Adjusted R-squared</i>	0,9937	0,3886
<i>Akaike info criterion</i>	-2,8864	5,0115
<i>Schwarz criterion</i>	-1,9951	5,9027
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-2,5258	5,3721
Model 2	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	15,8470***	6,1228***
<i>Govt Expenditure/PDRB</i>	0,0002	0,0014
<i>Govt Revenue/PDRB</i>	0,0010	0,0064
<i>R-squared</i>	0,9961	0,5950
<i>Adjusted R-squared</i>	0,9940	0,3799
<i>Akaike info criterion</i>	-2,9461	5,0304
<i>Schwarz criterion</i>	-2,0286	5,9479
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-2,5748	5,4016
Model 3	ln(PDB per Kapita)	Pertumbuhan Ekonomi
Konstanta	14,2183***	18,9672
<i>Govt Expenditure/PDRB</i>	0,0001	0,0025
<i>Govt Revenue/PDRB</i>	0,0000	0,0155
<i>ln(Govt Exp Barang Jasa)</i>	0,0751***	0,5672
<i>ln(Govt Exp Belanja Pegawai)</i>	0,0108	-0,3598
<i>ln(Govt Exp Belanja Modal)</i>	0,1229***	-1,8168
<i>R-squared</i>	0,9985	0,6020
<i>Adjusted R-squared</i>	0,9976	0,3606
<i>Akaike info criterion</i>	-3,8500	6,0697
<i>Schwarz criterion</i>	-2,8539	5,4766
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-3,4470	1,6754

Keterangan: \*\*\* signifikan untuk  $\alpha=1\%$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita. Berdasarkan model 3, hasil estimasi dengan pendapatan per kapita sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa variabel belanja barang dan jasa pemerintah provinsi, dan belanja modal pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hal itu sejalan dengan temuan Sodik (2007), hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode 1993-2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja dan derajat keterbukaan. Sementara itu, investasi swasta tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Pengeluaran modal pemerintah provinsi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap pendapatan per kapita dibandingkan dengan variabel lainnya (lihat Tabel 3). Kenaikan belanja modal pemerintah provinsi sebesar 1 persen akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,12 persen. Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar satu persen akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,07 persen.

## 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi dengan lebih detail mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah hubungan yang

ambigu. Investigasi empiris yang dilakukan meliputi investigasi hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada level antarnegara, di Indonesia, dan antarprovinsi di Indonesia.

Hasil estimasi untuk panel negara secara keseluruhan maupun kelompok negara dari model 1 (Tabel 1) menunjukkan bahwa variabel rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, kecuali untuk negara berpendapatan rendah. Untuk variabel rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada data panel semua negara maupun panel kelompok negara (lihat model 2 & 3 pada Tabel 1). Sedangkan variabel rasio *Gross Fixed Capital* terhadap PDB menunjukkan pengaruh positif dan signifikan untuk data panel negara, kelompok negara berpendapatan tinggi maupun kelompok negara berpendapatan menengah. Untuk variabel *Ln Foreign Direct Investment* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan untuk data panel semua negara dan kelompok negara berpendapatan menengah (lihat model 3 pada Tabel 1).

Hasil analisis untuk Indonesia menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dalam hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Sedangkan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita (lihat model 3 pada Tabel 2). Namun demikian, untuk estimasi di tingkat provinsi menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi. Faktor yang memengaruhi pendapatan per kapita di tingkat provinsi adalah belanja barang dan jasa pemerintah provinsi serta belanja modal pemerintah provinsi (lihat model 3 pada Tabel 3).

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antarpengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada banyak hal. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa dengan melakukan estimasi antarkelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan dan antarunit observasi (keseluruhan Indonesia dan provinsi di Indonesia), maka arah hubungan yang ditunjukkan pun bervariasi.

Dari hasil analisis penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi maka perlu kehati-hatian dalam memaknai hal tersebut. Mengingat pengeluaran pemerintah tidak dikelompokkan berdasarkan masing-masing kelompok pengeluaran, sehingga rekomendasinya adalah melakukan penelitian dengan memisahkan masing-masing pengeluaran sehingga dapat dilihat pengaruh masing-masing kelompok pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi (lihat model 3 pada Tabel 2). Namun, dapat dilihat juga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan pendapatan per kapita. Sehingga rekomendasinya adalah pengeluaran pemerintah yang menunjukkan ukuran fiskal negara tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

Ketiga, pada tingkat provinsi di Indonesia variabel pengeluaran modal pemerintah dan belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk kedua kelompok tersebut perlu mendapat perhatian bagi pemerintah provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshahrani, S. A., & Alsadiq, A. J. (2014). Economic growth and government spending in Saudi Arabia: An empirical investigation. *IMF Working Paper* WP/14/3.
- Arpaia, A., & Turrini, A. (2008). Government expenditure and economic growth in the EU: Long-run tendencies and short-term adjustment. *Economic Papers* 300, European Economy.
- Barro, R. J. (1989). The neoclassical approach to fiscal policy. 178-235. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a crossection of countries. *Quartely Journal of Economy*, 106, 407-444.
- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5), 533-556. doi:10.1111/j.1467-9957.2007.01028.x
- Devarajan, S., & Vinaya, S. (1993) What do government buy? The composition of public spending and economic performance. *Policy Research Working Paper, The World Bank*, WPS 1082
- Diamond, J. (1989). Government expenditure and economic growth: An empirical investigation. *IMF Working Paper NO 84/85*, Washington DC.
- Folster, S., & Henrekson, M. (1999). Growth and public sector: A critique of the critics. *European Journal of Political Economy*, 15(2), 337-358.
- Ghali, K. H. (1997). Government spending and economic growth in Saudi Arabia. *Journal of Economic Development*, 22(2), 165-172.
- Grossman, P. J. (1988). Government and Economic Growth. A non-linear Relationship. *Public Choice*, Vol. 56, 193-200.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Joharji, G. A., & Starr, M. (2011). Fiscal policy and growth in Saudi Arabia. *Review of Midle East Economics and Finance*, 6(3), 24-45. doi:10.2202/1475-3693.1305
- Kompas, T. (2000). Private incentives, government size and economic growth in Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2(2000).
- Kweka, J. P., & Morrissey, O. (2000). Government spending and economic growth in Tanzania, 1965-1996 (No. 00/6). CREDIT Research Paper.
- Landau, D. (1983). Government expenditure and economic growth: A cross country evidence. *Southern Economic Journal*, 49, 783-792.
- Lin, S.A.Y. (1994). Government spending and economic growth. *Applied Economic*, 26, 83-94.

- Loizides, J., & Vamvoukas, G. (2005). Government expenditure and economic growth: Evidence from trivariate causality testing. *Journal of Applied Economics*, 8(1), 125-152.
- Mangkoesebroto, G. (1999). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM.
- Nerlove, M. (2000). An essay history of panel data econometrics. *Ninth International Conference of Panel Data in Genewa, Swiss*.
- Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-sectional and *time-series* data. *American Economics Review*, 76, 191-203.
- Ramayadi, A. (2003). Economic Growth and Government Size in Indonesia: Some Lesson for the Local Authorities. *Working Paper in Economics and Development Studies 20032*. Department of Economics, Universitas Padjadjaran.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), 71-102.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: Studi kasus data panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 12(1), 27-36.

---

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

---